

1. Orang Ramai atau masyarakat

Mereka inilah yang paling besar perannya karena dari merekalah diketahui bahwa seseorang itu telah berbuat zina. Hasil dari aduan orang ramai inilah, maka barulah bisa di buat analisa bahwa aduan itu benar dan bisa dilakukan penangkapan.

2. Bagian Penguatkuasa dan Pendakwaan

Bagian inilah yang berperan menerima aduan dari orang ramai mencari kebenaran dari aduan tersebut dan bertindak bersama-sama yang lain melakukan penangkapan ke atas pezina. Bagian ini merupakan bagian utama yang bertugas memberantas maksiyat yang berlaku di negeri Perak. Aktivitas utama yang dilakukan oleh bagian Penguatkuasa dan Pendakwaan yaitu :

a. Melaksanakan Enakmen-enakmen berikut :

- 1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak 1992
- 2) Enakmen Jinayah Syariah Perak 1992
- 3) Undang-undang Keluarga Islam Perak 1984 pindaan 1992.

- b. Mencegah , mengawal kemungkaran dan maksiyat dari terus berleluasa didalam Negeri Perak .
- c. Mencegah , mengawal ajaran atau doktrin yang bertentangan dengan Pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah .
- d. Mempastikan keagungan Agama Islam dihormati daripada dicela , dipersenda atau dipermainkan oleh anasir yang hendak merosakkan Agama Islam .
- e. Mempastikan pihak berkuasa Agama dihormati dalam melaksanakan tanggungjawabnya .
- f. Mengawal semua bentuk sebaran samaada buku , risalah atau dokumen yang memberi pengajaran tentang Agama Islam agar bertepatan dengan Hukum Syara' (Yusri bin Abd Rani , tth : 15) .

3. Polisi

Polisi ikut berperan dalam melakukan risikan dan membuat tangkapan kepada pesalah setelah terbukti bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan kesilapan dan maksiyat baik berupa khalwat dan seterusnya persetubuhan haram (zina) . Polisi turut berperan dalam urusan penahanan , soal jawab dan di pengadilan agamanya .

4. Dokter

Dokter pula berperan untuk mensahkan bahwa seseorang itu telah berbuat zina hasil dari pemeriksaannya .

5. Pengadilan Syariah Perak

Tugas-tugas untuk menghapuskan kasus zina adalah diselesaikan di sini . Pengadilan Syariah Perak ditubuhkan di bawah seksyen 40(1)(2)(3) , Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perak , Bil 2 , tahun 1992 . Jabatan ini diketuai oleh Hakim Ketua dan dibawahnya terdapat hakim-hakim dan Ketua Jabatan Kehakiman Syariah Perak . Di bawah kekuasaannya terdapat dua orang hakim Pengadilan Tinggi Syariah , seorang dikenali sebagai ketua pendaftar , enam orang hakim Pengadilan Rendah Syariah , Pegawai kerja dan pegawai-pegawai biasa yang ikut serta membantu sebanyak 34 orang . Keseluruhan pegawai-pegawai di jabatan kehakiman Syariah adalah sebanyak 45 orang (Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak , 1996 : th) .

Pengadilan Syariah Negeri Perak berkuasa untuk mendengar , membicara dan membuat apa-apa keputusan di dalam kasus jinayah dan mal (harta) . Tingkatan pengadilannya adalah seperti berikut :

a . Pengadilan Rayuan Syariah

Pengadilan Rayuan Syariah adalah pengadilan tertinggi di dalam bagian Pengadilan Syariah Perak . Kuasanya mendengar dan memutuskan apa-apa rayuan terhadap keputusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Syariah .

b . Pengadilan Tinggi Syariah

Pengadilan Tinggi Syariah berkuasa di negeri Perak . Di dalam kasus jinayah , ia berkuasa menjatuhkan apa-apa hukuman tidak lebih daripada lima ribu ringgit atau penjara bagi tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya dan menjatuhkan hukuman dera tidak lebih dari enam kali deraan . Kekuasaannya pula , ia bisa mendengar dan menentukan keputusannya . Pengadilan Tinggi Syariah juga berkuasa mendengar apa-apa rayuan daripada Pengadilan Rendah Syariah .

c . Pengadilan Rendah Syariah berkuasa pada kawasan Kabupatennya saja . Dalam kasus jinayah , pengadilan ini mempunyai kuasa yang mana hukuman paling besarnya adalah tidak melebihi tempoh dua tahun atau kedua-duanya . Pengadilan Rendah Syariah berkuasa mendengar dan menjatuhkan keputusan di mana jumlah atau nilai hal

perkara yang dipertikaikan tidak melebihi seratus ringgit . (Jabatan kehakiman Syariah Negeri Perak , 1996 : th) .

6. Hakim

Hakim Pengadilan Rayuan Syariah , Hakim Pengadilan Tinggi Syariah dan Pengadilan Rendah Syariah yang dipilih masing-masingnya di bawah seksyen 41 , 42 dan 43 Akta Pentadbiran . (Undang-Undang Malaysia Akta 559 , 1997 : 8) . Hakimlah yang bertanggungjawab memutuskan (menentukan) bahwa seseorang itu benar-benar bersalah atau tidak dan apakah dia bisa membuat rayuan di pengadilan rayuan untuk meringankan hukumannya .

B. Proses Pengajuan Perkara

1. Menerima berita dan aduan daripada orang ramai .
2. Meneliti berita dan aduan , membuat kajian dan memberitahukan kepada ketua penguatkuasa atau penolongnya dan menerima perintah seterusnya .
3. Membuat tinjauan awal , analisa dan mengatur langkah untuk membuat tindakan .
4. Bertindak (membuat penguatkuasaan dan tangkapan) .

5. Mengambil , mengumpul dan mencatatkan semua barang kasus yang berhubungan .
6. Membuat laporan dan aduan polisi jika perlu .
7. Menyerahkan laporan dan barang-barang kasus (jika perlu) kepada ketua penguatkuasa atau penolongnya .
8. Mencatatkan semua pergerakan dan tindakan di dalam buku catatan harian penguatkuasa .
9. Memberi keterangan kepada pegawai penyelidik .
10. Menjadi saksi pendakwa di pengadilan .
11. Menjadi penghubung kepada jabatan-jabatan pemerintah seperti polisi , imigrasi , kebajikan masyarakat dan sebagainya .
12. Lain-lain tugas yang diperintahkan oleh wakil ketua dan ketua pegawai dalam bagian undang-undang jinayah syariah . (Yusri , tth : 26) .

Dari keterangan di atas , dapatlah diketahui susunan dalam Pelaksanaan proses pengajuan perkara . Perincian keterangan dari proses pengajuan perkara yaitu :

a) Menerima Aduan/berita dari Orang Ramai

Pada bagian pertama yaitu menerima berita dari orang ramai dan berita itu datanganya dengan tiga cara yaitu datang sendiri , kiriman surat

dan melalui telefon . Keterangan melalui lisan dan telefon semuanya akan direkam dalam kaset untuk memperjelaskan lagi sebagai satu bukti .

Pada bagian kedua yaitu mengambil keterangan aduan dengan lengkap dan tepat . Pihak penerima aduan akan mengambil nama pengadu , alamat , nombor kartu tanda penduduk , pekerjaan , tanggal pengaduan dibuat dan berapa banyak aduan yang dilaporkan . Semua butir-butir peribadi tersebut akan dirahsiakan dan disimpan demi menjaga kemaslahatan diri pengadu .

Setelah mengambil keterangan di atas dengan jelas , maka semua bahan aduan itu akan dikumpulkan (dibukukan) dalam daftar aduan dan ditulis dengan jelas serta menggunakan formulir yang disediakan supaya nanti mudah dalam proses pembuktiannya .

Setelah semua maklumat terkumpul dan ditulis dengan jelas , maka berita yang terkumpul dan formulir-formulir yang telah diisi itu dibawa kepada pimpinan atau pembantu pimpinan untuk dipastikan yang aduan tersebut benar-benar lengkap dan bisa dipercayai serta bisa diambil tindakan seterusnya .

Apabila ketua pegawai agama telah mensahkan kebenaran aduan itu barulah aduan dan maklumat tentang aduan tersebut dibawa kepada

bagian penyelidikan ataupun bagian penelitian untuk membuktikan aduan yang disampaikan itu benar dan bagian ketua pegawai pendakwaan perlu bertindak untuk menunjukkan kepedulian yang serius pada sebarang aduan yang disampaikan oleh orang ramai .

b . Datangnya Pengadu Ke Kantor Untuk Membuat Aduan

Berdasarkan keterangan tentang bagaimana satu aduan itu dibuat , maka dapatlah diketahui bahwa suatu aduan itu diterima bukanlah semudah yang disangkakan . Keterangan seterusnya adalah berhubungan dengan maklumat yang disampaikan dengan datangnya sendiri pengadu ke Kantor bagian Penguatkuasa dan Pendakwaan .

Sebelum menerima kedatangan pihak pengadu ke kantor , harus terlebih dahulu mendapatkan keizinan dari ketua pegawai bagian Penguatkuasa dan Pendakwaan . Sesudah ada keizinan darinya barulah bisa diterima pengadu itu datang memberikan keterangan .

Dalam menerima aduan-aduan yang disampaikan itu harus menggunakan formulir yang disediakan . Formulir itu harus diisi dahulu yaitu yang menyatakan kesanggupannya menyampaikan keterangan dengan benar dan tidak ada penipuan dalam ceritanya itu .

Seterusnya keterangan tentang latar belakang diri pengadu itu diambil dengan sejasanya . Begitu juga pengadu itu bisa dianggap sebagai saksi justru itulah keterangan tentang dirinya cukup perlu diketahui . Seterusnya keterangan tentang kasus yang mahu disampaikan itu , juga turut didengar oleh beberapa orang pegawai di situ sebagai bukti bahwa aduan itu memang ada dan aduan itu akan diperdengarkan kembali melalui rekaman yang telah dibuat dan disampaikan oleh pengadu. Semuanya dimaksudkan untuk mengatasi berlakunya penipuan dalam penyampaian maklumat . Sesudah semuanya jelas , barulah pengadu dan sekaligus sebagai saksi menurunkan tanda tangannya sebagai pengesahan atas pertanggungan jawabnya dia di dalam menyampaikan maklumat tersebut .

c . Proses Dilakukan Penelitian

Setelah menerima maklumat dan salinannya , barulah dilaksanakan penelitian untuk memastikannya , bahwa berita-berita yang disampaikan itu benar . Perincian keterangan tentang adanya penelitian sebelum berlakunya penangkapan adalah seperti berikut ini .

Untuk memastikan kebenarannya barulah dibuat laporan atau pemberitahuan kepada polisi dan polisi akan bertindak bersama-sama mencari bukti-bukti untuk mengetengahkan kasus tersebut . Semua barang-barang yang bisa menjadi bukti akan disimpan di kantor polisi dan akan digunakan kapan-kapan ia diperlukan .

Seterusnya polisi pergi mencari bukti tersebut secara lapangan dan dicari tambahan bukti yang bisa membawa terdakwa untuk ditangkap . Penelitian terus menerus dilakukan kepada pihak yang telah didakwa dan ini bisa mengambil masa yang lama .

Setelah semua bukti-bukti itu dimasukkan dalam sebuah map dan disebutkan nama kasus yang timbul dan yang dilakukan oleh siterangka itu supaya mudah berurusan dengan lebih mendalam ketika menangani penyelesaian kasus ini .

Sesudah itu bagian pendakwaan dan polisi serta para pegawai yang lain akan mengumpulkan saksi-saksi dan semua keterangan atau barang lain yang bisa dijadikan bukti akan disimpan . Keterangan dari saksi-saksi akan ditulis dan direkam supaya tidak timbul soal kebohongan di kemudian hari .

Setelah semua laporan dan maklumat lengkap barulah pergi ke tempat kejadian tersebut dan melihat keadaan sekelilingnya supaya tahu apa yang diperlukan dan tidak diperlukan sewaktu berada di tempat itu nanti yaitu waktu berlakunya penangkapan. Setelah itu diambil foto keadaan sekeliling dan dikenal pasti kedudukan lokasi serta diambil foto lokasi itu supaya tidak berlakunya kesalahan tempat terutamanya sewaktu tangkapan itu dibuat.

Semua barang-barang bukti kasus dilengkapkan dan dikumpulkan di suatu tempat supaya mudah apabila telah sampai waktunya bertindak. Map-map yang telah lengkap diisi itu akan diserahkan kepada pendakwa untuk membolehkan beliau mengkaji kesohahan kasus tersebut.

d . Proses Dilakukan Tangkapan

Sesudah selesai proses penelitian dijalankan dan terbukti bahwa semua aduan-aduan yang sampai itu benar dan adanya perintah dari ketua pegawai untuk membuat tangkapan, barulah tangkapan itu bisa dibuat. Dalam bagian tangkapan, ia merupakan bagian terpenting di mana yang bersalah akan ditahan untuk sementara waktu di penjara / tahanan.

Dalam bagian ini prosesnya bermula dari menerima perintah ketua pegawai atau pembantunya yaitu dari bagian penguatkuasa dan pendakwa untuk membuat tangkapan. Setelah menerima perintah tersebut, para pegawai-pegawai yang lain yaitu terlibat dalam bagian tangkapan akan berkumpul dan berdiskusi kapan waktu yang tepat dan bagaimana tangkapan itu akan dibuat.

Semua pegawai yang terlibat itu akan pergi ke lokasi aduan dan tempat di mana si pezina itu berada. Pada waktu tangkapan itu dibuat, si pezina harus sedang berada bersama pasangannya supaya mudah untuk membuktikan kesalahannya itu. Sesudah benar-benar yakin yang terdakwa sedang bersama pasangannya dalam keadaan mencurigakan, barulah tangkapan itu dibuat. Kedua pelaku yang ditangkap itu dibawa ke kantor polisi bersama barang-barang yang bisa dibuat bukti contohnya foto berdua-duaan, keterangan dari jiran-jiran yang berdekatan dan sebagainya.

Di kantor polisi, mereka ini akan ditanya tentang perhubungan dan perbuatan yang telah mereka perbuat. Di sinilah semua berita tentang diri pelaku zina diambil dan disimpan di satu map khusus dan mereka ini dianggap sebagai orang yang telah mempunyai kasus jinayah. Mereka

akan ditanya tentang kesalahan perbuatan mereka itu dan diminta membuat pengakuan jika sekiranya mereka benar-benar telah berbuat zina atau perbuatan lain . Hasil dari pengakuan mereka ini cukup penting untuk dijadikan sebagai bahan bukti . Andainya kedua-dua pasangan itu tidak mengaku mereka berbuat zina , mereka tetap juga di hukum yaitu dengan kesalahan *khalwat* .

Pasangan itu akan ditahan di penjara atau di kantor polisi selama tempoh dua puluh empat (24) jam . Selepas itu barulah mereka dibenarkan membuat jaminan untuk membebaskan mereka buat sementara waktu sambil menunggu ke suatu waktu dipanggil kembali untuk disidangkan di pengadilan .

Setelah pasangan tersebut dibebaskan buat sementara waktu , pihak polisi dan pegawai-pegawai di bagian agama akan menyiapkan laporan dengan lebih tepat untuk dibawa dan disimpan sebagai suatu kasus di Kantor Agama . Semua informasi dan bahan bukti tersebut akan diserahkan kepada ketua pegawai bagian penguatkuasa dan pendakwaan serta pembantunya .

Seterusnya ketua pegawai tersebut akan menyerahkan pula kepada pegawai bagian penelitian untuk mencari bukti yang lebih kuat lagi

supaya kesalahan itu dapat dibuktikan dengan sebenar-benarnya . Dari sinilah bermulanya si pesalah dibawa ke pengadilan untuk disidangkan dan dijatuhkan hukuman yang paling sesuai dengan kesalahannya itu . Hukuman untuk pesalah itu adalah merupakan hukuman berbentuk ta'zir seperti yang telah ditetapkan oleh Enakmen Jinayah .

C. Proses Pembuktian Telah Berlakunya Zina Menurut Enakmen Jinayah Islam Negeri Perak Malaysia

Setelah terbukti yang sipelaku telah berbuat zina , maka beliau akan di bawa ke pengadilan untuk dijatuhkan sanksi yang sebagaimana sesuai untuknya . Walaupun adanya bukti-bukti seperti di atas , dia masih perlu memperkuat lagi bukti-buktinya di Pengadilan supaya hukuman dapat dijalankan dengan seadil-adilnya . Firman Allah dalam Surah An-nisa' ayat 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَةَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (الن: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya , dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukuman di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil” (QS. An-Nisa' ayat 58) .

Di Pengadilan Syariah Perak bagi kasus zina , pembuktiannya hanya melalui *iqrar* dan hamil bagi perempuan . Pengakuan melalui *iqrar* menurut enakmen dijelaskan melalui seksyen no 17 dan 18 yaitu :

17. (1) *Iqrar* ialah pernyataan lisan , bertulis atau secara isyarat yang dibuat oleh seseorang bahwa dia di bawah obligasi (pen. jagaan) tertentu kepada seorang lain tentang sesuatu hak orang lain itu ke atasnya dan yang dibuat oleh mana-mana orang dalam mana-mana hal keadaan yang disebutkan kemudian daripada ini .
- (2) *Iqrar* yang dibuat di luar Mahkamah hanya boleh diterima jika dibuat di hadapan dua orang saksi adil .
- (3) *Iqrar* seorang wakil , dalam prosiding (pen. persyaratannya) bagi pihak orang yang memberi wakil , yang dibuat di hadapan hakim , boleh diterima .
- (4) *Iqrar* dalam kes zina hendaklah diterima jika dibuat di hadapan Mahkamah (pen. pengadilan).
- 18.(1) Pembuat *iqrar* hendaklah seorang yang akil baligh .
- (2) Kecuali diperuntukkan selainnya *iqrar* yang berikut ini tidak boleh diterima :
 - a) *Iqrar* seorang kanak-kanak
 - b) *Iqrar* seorang gila atau yang terencat akal(pen. gila)
 - c) *Iqrar* wali atau penjaga bagi seseorang di bawah jagaan atau tanggungjawabnya .
- (3) *Iqrar* seorang kanak-kanak mumaiyiz yang telah diberi kebenaran oleh wali atau penjaganya untuk menjalankan perniagaan dan berurusan dengan orang ramai hendaklah dianggap sebagai *iqrar* seorang dewasa bagi maksud seksyen ini dan *iqrar* itu hendaklah diterima sebagai sah .
- (4) Pihak yang mendapat faedah daripada *iqrar* tidaklah disyaratkan seorang yang akil baligh .
- (5) Sesuatu *iqrar* hendaklah dibuat dengan rela hati tanpa paksaan .
- (6) Pembuat *iqrar* hendaklah terdiri daripada orang yang tidak ditahan daripada menguruskan hartanya (mahjur'alaih) .
- (7) *Iqrar* yang dibuat dalam keadaan mabuk tidak boleh diterima dalam

kes-kes (pen. kasus-kasus) yang boleh dikenakan hukuman Hudud menurut Hukum Syara'. (Enakmen Keterangan (Mahkamah Syariah), 1994 : 27).

Iqrar yang dibuat oleh pezina bukan hanya empat kali malahan lebih dari empat kali supaya tidak timbul kecurigaan. Pengakuan pertama akan dilakukan di hadapan *qadhi* dan para pegawai di sana sebanyak empat kali berulang-ulang bahwa dia telah berbuat zina. Untuk memperkuat lagi pengakuan itu maka pezina itu juga akan membuat pengakuan melalui tulisan yaitu dengan menulis pengakuannya di atas formulir yang disediakan sebanyak empat salinan.

Pengakuan kedua secara lisan dan tulisan yaitu di hadapan polisi dan lebih dari empat orang pegawainya sebagai saksi atas pengakuan yang dibuat itu. Mereka ini akan mendengarkan dengan teliti apa yang *diiqrarkan*.

Pengakuan ketiga yaitu di hadapan hakim di Pengadilan dan didengar oleh saksi-saksi yang lain yang ada di Pengadilan tersebut. Pengakuan tersebut bukanlah dipaksa atau karena ancaman sesuatu tetapi datang dari kerelaan si pezina itu sendiri. Justru karena itu, pengakuan itu dilakukan secara berulang-ulang kali dan setiap kali beliau *beriqrar*, maka beliau akan diberitahukan akibat dan hukuman dari pengakuannya tersebut.

Tetapi jika sipelaku zina menarik kembali pengakuannya di hadapan hakim sewaktu proses peradilan maka hukum zina tidak boleh dijatuhkan malahan ia hanya dijatuhkan dengan hukuman *khalwat* yaitu hukuman paling dekat dengan zina (Wawancara dengan Tuan Haji Ismail, 12 Februari 1998 di Ipoh Perak Malaysia).

Bagi pembuktian melalui hamil pula, hanya dilakukan ke atas wanita sahaja. Setelah terbukti bahwa dia hamil tanpa nikah atau melahirkan anak sebelum cukup tempoh enam bulan pernikahannya dan disertai dengan pengakuannya bahwa dia telah berzina sebelum bernikah secara sah, tanpa dipaksa oleh sesiapa pun, maka dia akan dijatuhkan hukuman seperti yang terdapat dalam Enakmen Jinayah Syariah 1992 seksyen 48.

Hukuman bagi bukti ini biasanya hanya berlaku ke atas wanita kerana beliau tidak mampu lagi menyembunyikan kesalahannya itu dan seringnya laki-laki akan bebas dari dijatuhkan hukuman kerana sulit dalam proses pembuktiannya melainkan jika laki-laki tersebut mahu melakukan *iqrar* bahwa beliau telah berzina dengan wanita tersebut dan mahu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka barulah laki-laki tersebut turut dihukum. Makanya tangkapan yang selalunya dibuat itu dipastikan bahwa

- a) Dalam tiap-tiap kes mengenai suatu kesalahan di mana pesalah dihukum membayar suatu denda maka mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu boleh , menurut budi bicaranya , melakukan semua atau mana-mana perkara yang berikut :
- (i) membenarkan masa bagi pembayaran denda itu .
 - (ii) Mengarahkan pembayaran denda itu dibuat secara ansuran (pen. cicilan)
 - (iii) Mengarahkan bahwa sekiranya terdapat keingkaran membayar denda tersebut pesalah itu hendaklah menjalani hukuman pemenjaraan selama suatu tempoh yang tertentu , yang mana hukuman pemenjaraan itu hendaklah sebagai tambahan kepada apa-apa hukuman pemenjaraan yang lain yang mungkin dikenakan ke atasnya (Kanun Acara Jenayah (Syariah) Perak , 1994 : 214) .

Hukuman berupa pembayaran uang itu harus dibayar oleh terdakwa . Namun begitu ada kelonggaran dalam proses pembayarannya yaitu dengan memberikan waktu yang ditetapkan untuk membayar . Apabila siterdakwa dalam keadaan tidak mampu membayar dalam waktu yang ditetapkan sekaligus maka dia bisa membayar secara cicilan dalam waktu tempoh yang ditetapkan . Jika didapati siterdakwa tidak mampu membayar sanksi tersebut atau tidak mahu membayarnya maka dia akan dijatuhkan dengan hukuman penjara selama tempoh tertentu yang ditetapkan oleh pengadilan . Hukuman penjara ini akan ditambah lagi dengan tempoh penjara yang sewajarnya dia terima akibat dari perzinaan tersebut .

Keterangan tentang penggantian hukuman sanksi berupa uang kepada penjara berdasarkan Kanun Acara Jinayah (Syariah 1994) seksyen 119 yaitu :

“Apabila seseorang pesalah telah dihukum denda (pen. sanksi) sahaja dan dihukum penjara karena keingkaran membayar denda itu dan Mahkamah mengeluarkan suatu waran (pen.surat penahanan) di bawah seksyen yang terdahulu sebelum ini , Mahkamah bolehlah mengantungkan pelaksanaan hukuman pemenjaraan itu dan boleh melepaskan pesalah itu apabila dia menyempurnakan suatu bon , dengan penjamin-penjamin sebagaimana Mahkamah fikirkan patut , mensyaratkan dia hadir di hadapan Mahkamah itu pada hari yang ditetapkan bagi mengembalikan waran itu dan sekiranya denda itu masih tidak dibayar Mahkamah boleh mengarahkan supaya hukuman pemenjaraan itu dilaksanakan dengan segera (Kanun Acara Jenayah syariah , 1994 : 216) .

2. Hukuman Berupa penjara / tahanan

Untuk menjalankan hukuman tersebut , harus mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan berdasarkan Kanun Acara Jinayah (Syariah) 1994 seksyen 117 yaitu :

- a. Jika tertuduh dihukum penjara , Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu hendaklah dengan segera menghantar suatu waran (pen. surat tahanan) kepada penjara atau tempat lain di mana dia akan dikurung dan , melainkan jika tertuduh itu telah sedia dikurung di dalam penjara atau tempat lain itu , Mahkamah hendaklah menghantarnya dalam jagaan polisi atau pegawai penguatkuasa agama ke penjara atau tempat lain itu berserta dengan waran itu .
- b. Tiap-tiap waran bagi pelaksanaan sesuatu hukuman pemenjaraan hendaklah diarahkan kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi

penjara atau tempat lain itu di mana banduan (pen. orang yang bersalah) itu sedang atau hendak dikurung .

- c. Apabila banduan itu hendak dikurung di dalam suatu penjara atau tempat lain , waran itu hendaklah diserahkan-simpan dengan pegawai yang bertanggungjawab bagi penjara atau tempat lain itu .
 - d. Tiap-tiap hukuman pemenjaraan hendaklah berjalan kuatkuasa mulai dari tarikh hukuman itu dijatuhkan , melainkan jika Mahkamah yang menjatuhkan hukuman itu mengarahkan sebaliknya .
- (Kanun Acara Jenayah (Syariah) , 1994 : 213) .

Sebelum menghantar seseorang yang telah dijatuhkan hukuman itu ke penjara , pihak pengadilan akan menghantar suatu berita atau pemberitahuan akan kemasukannya itu . Pihak pesalah itu juga akan diberitahu tentang tempat dimana hukuman penjaranya itu akan dilaksanakan . Dalam penghantaran ke penjara , pesalah tersebut akan pergi bersama-sama polisi yang telah ditetapkan dan dibawa bersama-samanya surat pemberitahuan / surat penghukuman dari pengadilan tersebut .

Surat kemasukan dalam penjara itu akan dibawa oleh polisi dan diserahkan kepada pegawai yang bertugas dan bertanggungjawab ke atas penjara tersebut . Jika terjadi perubahan dan pesalah itu ditukarkan ke penjara lain , maka surat tanda masuk tahanan dan pertukaran akan dibawa dan diserahkan kepada pegawai yang bertugas itu . Hukuman tahanan dihitung bermula sejak dari hukuman penjara yang diumumkan

di pengadilan melainkan jika pihak pengadilan membuat perubahan di lain waktu , maka tanggal penahanan itu bisa berubah ke suatu waktu yang ditentukan .

3 . Hukuman Dera / jilid

Dalam hukuman zina turut dikenakan hukuman dera sebanyak enam kali . Untuk melaksanakan hukuman jilid itu , harus berdasarkan keterangan dari seksyen nombor 121 yaitu :

- (1) Peruntukan-peruntukan seksyen ini , seksyen 122 dan 123 hendaklah terpakai apabila tertuduh itu dihukum sebat (pen. dera) .
- (2) Alat sebatan , tidak termasuk pemegangnya , hendaklah daripada jenis yang sama dan dibuat sama ada daripada rotan (pen. bambu) atau ranting kecil pokok yang tiada ruas atau buku , dan panjangnya tidak melebihi 1.2 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter .
- (3) Peruntukan-peruntukan berikut hendaklah diikuti apabila melaksanakan hukuman sebat , iaitu :
 - a. Sebelum pelaksanaan hukuman itu , pesalah hendaklah diperiksa oleh Pegawai Perubatan (pen. doktor) yang diberikuasa untuk memperakui bahawa pesalah itu adalah dalam keadaan kesihatan yang baik untuk menjalani hukuman itu ;
 - b. Jika pesalah itu sedang hamil , pelaksanaan itu hendaklah ditangguhkan sehingga tamatnya tempoh dua bulan selepas melahirkan anak atau keguguran , mengikut mana-mana yang berkenaan ;
 - c. Hukuman hendaklah dilaksanakan di hadapan Pegawai Perubatan di tempat awam sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah atau di tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri atau Persekutuan bagi maksud itu ;
 - d. Orang yang dilantik untuk melaksanakan hukuman tersebut hendaklah seorang yang adil dan matang ;

- e. Orang itu hendaklah menggunakan alat sebatan itu dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak melukakan (pen. cacat) kulit pesalah ;
 - f. Selepas mengenakan satu sebatan , dia hendaklah mengangkat alat sebatan itu ke atas dan bukan menariknya ;
 - g. Sebatan boleh dikenakan ke seluruh bahagian tubuh kecuali muka , kepala , perut , dada atau bahagian-bahagian sulit ;
 - h. Pesalah hendaklah dibenarkan memakai pakaian mengikut Hukum Syara' ;
 - i. Jika pesalah itu lelaki sebatan hendaklah dikenakan semasa dia berdiri dan jika pesalah itu perempuan semasa dia duduk ;
 - j. Jika semasa pelaksanaan hukuman sebat itu Pegawai Perubatan memperakui bahawa pesalah tidak lagi dapat menerima sebatan , sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahawa pesalah tidak lagi dapat menerima sebatan , sebatan itu hendaklah ditangguhkan sehingga Pegawai Perubatan itu memperakui bahwa pesalah itu sihat , tubuhnya untuk menjalani baki hukuman tersebut .
- (4) Dalam kes di mana pesalah dihukum sebat sahaja , dia hendaklah diperlakukan seolah-olah dia dihukum penjara sehingga hukuman itu dilaksanakan .
- (5) Jika Pegawai Perubatan memperakui bahawa pesalah itu oleh kerana umur tua , uzur atau apa-apa sebab lain pesalah itu tidak dapat menjalani hukuman sebat pada keseluruhannya atau sebahagiannya , maka kes itu hendaklah dirujuk kepada Mahkamah yang boleh memerintahkan pelaksanaan hukuman itu mengikut cara yang difikirkannya munasabah (pen. cocok) . (Kanun Acara Jenayah (Syariah) , 1994 : 216-218) .

Hukuman dera yang dijatuhkan kepada pesalah itu hendaklah mereka dalam keadaan sehat . Oleh itu terlebih dahulu mereka akan dicek untuk dipastikan pesalah itu benar-benar sehat . Apabila yang bersalah itu hamil ketika hukuman mahu dijatuhkan , maka hukuman itu

akan ditangguhkan dulu dan akan dilakukan kembali pada setelah dua bulan dia selamat melahirkan atau dua bulan setelah dia keguguran .

Hukuman dera itu akan dilakukan di hadapan Pegawai Perubatan (dokter) seperti yang diperintahkan oleh pengadilan propinsi tersebut . Orang yang menjalankan hukuman itu tidaklah bisa sebarang orang saja akan tetapi harus seorang yang adil dan matang (dewasa) .

Sewaktu menjalankan hukuman , pegawai itu akan menggunakan alat dera itu dengan kekuatan yang sederhana tanpa mengangkat tangannya melebihi kepalanya supaya tidak mencederakan kulit pesalah itu . Selepas membuat suatu *jilidan* , hendaklah dia mengangkat alat *jilidan* itu keatas dan bukan menariknya . *Jilidan* dengan cara itu diteruskan lagi sampai selesai yaitu sebanyak enam kali .

Jilidan itu bisa dibuat keseluruh bagian tubuh badan kecuali muka , kepala , perut , dada dan bagian-bagian sulit . Pesalah itu akan dibenarkan memakai pakaian terutamanya wanita , keadaan ini adalah untuk mengelakkan berlakunya suatu fitnah atau perkara yang bisa memalukan ke atas diri pezina itu .

Keadaan dera yang dibuat ke atas perempuan dan laki-laki juga berbeza . Untuk pesalah yang laki-laki dera itu dilakukan dalam keadaan

berdirinya laki-laki itu . Bagi perempuan pula , dalam keadaan duduk barulah dera itu bisa dilakukan . Sekiranya waktu pelaksanaan hukuman itu , pegawai perubatan mengakui bahwa pesalah itu dalam keadaan tidak sehat , maka hukuman itu tidak dapat diteruskan . Hukuman berupa *jilidan* , akan dilakukan kembali pada waktu yang diakui oleh dokter yang pesalah itu telah benar-benar sehat dan bersedia menyelesaikan hukuman itu .

Sekiranya dokter mengakui bahwa pesalah itu telah terlalu tua , telah uzur dan terdapatnya alasan-alasan lain seperti cacat atau sebagainya , maka dalam keadaan seperti ini ia akan diputuskan kembali oleh pengadilan tentang hukuman yang paling cocok dan wajar dilakukan ke atas pesalah itu untuk menggantikan hukuman dera dengan hukuman lain . Hukuman dera itu tidaklah dilaksanakan dengan semudah yang disangka malahan dia dilaksanakan menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan supaya tidak berlaku kesan yang tidak baik . Hukuman dera adalah bertujuan supaya orang yang berzina itu merasa jera dan tidak mengulangi melakukannya lagi terutamanya pelacur karena hukuman bagi mereka ini tidak ada keringanan dan pengampunannya dari pihak berkuasa yang menjalankan undang-undang tersebut .

Bagi yang dijatuhkan hukuman sanksi dan dera harus memenuhi keterangan seksyen no.122 dan 123 yaitu :

122: Apabila tertuduh itu dihukum denda dan sebat atau sebat sahaja , hukuman sebat itu hendaklah dilaksanakan pada semua tempat dan waktu sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah (Kanun Acara Jenayah Syariah, 1994 : 218) .

Dari pasal 122 di atas , dapatlah diketahui bahwa hukuman dera yang dijatuhkan itu harus dilakukan di suatu tempat yang khusus yang mana tempat tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan . Ini bermakna bahwa tempat untuk dilakukan dera itu tidaklah sebarang tempat tapi di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Pengadilan dan tempat tersebut dipastikan hukuman dera itu dapat dilaksanakan dengan tenang dan selamat tanpa sebarang gangguan atau sebarang tindakan dari pihak pesalah yang dilakukan oleh warisnya .

Berhubung dengan waktu pelaksanaan hukuman itu pula , tidaklah sebarang waktu saja akan tetapi ada waktu-waktu khusus yang telah ditetapkan oleh Pengadilan . Waktu ini penting karena hukuman itu tidak dilaksanakan untuk seorang pelaku zina saja akan tetapi selalunya dikumpulkan beberapa orang dan akan di hukum dalam suatu waktu . Keadaan ini adalah untuk memudahkan hukuman itu dilakukan dan

mudah untuk mengumpulkan saksi yang selalunya terdiri dari pihak pengadilan itu sendiri dan saudara terdekat diri pezina itu .

- 123(1) Apabila tertuduh itu dihukum penjara dan sebat , pelaksanaan hukuman sebat itu tidaklah boleh dikenakan jika suatu rayuan dibuat sehingga hukuman itu disahkan oleh Mahkamah Rayuan yang berkenaan .
- (2) Sebatan itu hendaklah dikenakan dengan seberapa segera yang praktik selepas habis tempoh empat belas hari , atau dalam hal sesuatu rayuan dengan seberapa segera yang praktik selepas penerimaan perintah Mahkamah Rayuan yang berkenaan yang mengesahkan hukuman itu . (Kanun Acara jenayah syariah , 1994 : 219) .

Bagi mereka yang dihukum dengan hukuman dera , pelaksanaan hukuman dera itu tidaklah langsung bisa dilaksanakan . Hukuman itu akan dilakukan pada suatu waktu yang ditetapkan akan tetapi , apabila siterdakwa mengaku salahnya dan memohon rayuan agar hukuman dera itu tidak dilakukan atasnya , maka waktu hukuman dera itu juga turut ditangguhkan .

Apabila seseorang itu membuat rayuan di Pengadilan Rayuan maka , rayuannya itu harus diperdengarkan akan tetapi jawabannya tidaklah semua diterima . Pengadilan Rayuan pulalah yang berhak menentu dan menetapkan bila hukuman itu hendak dilaksanakan dan hukuman itu tidak bisa dikurangkan menjadi dua atau tiga kali dera

saja . Pertimbangan yang dibuat hanya untuk menukarkan hukuman dera itu dengan hukum lain contohnya dengan membayar sanksi berupa uang dan jumlah uang itu akan bertambah menjadi lebih besar . Alasan yang dibuat oleh perayu itu mungkin dengan menjelaskan kondisi kesehatannya , kecacatannya dan sebagainya akan tetapi Pengadilan Rayuan punya kuasa untuk meneruskan hukuman dera atau tidak .

Hukuman dera itu dilaksanakan dalam waktu yang dekat dengan tanggal hukuman dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Syariah yaitu selepas empat belas hari dari tempoh penjatuhan hukumannya . Apabila terdakwa membuat rayuan barulah tanggal hukuman itu berubah yaitu berdasarkan tanggal yang ditetapkan oleh Pengadilan Rayuan . Hukuman itu seringkali diminta oleh Pengadilan Rayuan Syariah dilaksanakan dengan secepatnya . Semuanya itu untuk memudahkan lagi urusan penjatuhan hukuman karena dikhawatiri kalau dibiarkan , si pezina itu bisa melarikan diri .

E. Proses Membuat Rayuan

Setelah pengakuan itu , dan betul-betul terbukti bahwa terdakwa itu bersalah , barulah bisa dijatuhkan hukuman berupa sanksi berupa lima

ribu ringgit (RM 5000.00) , penjara selama tiga tahun dan dera sebanyak enam kali . Selepas menerima hukuman tersebut si terdakwa bisa membuat rayuan di Pengadilan Rayuan secara bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penghakiman .

Keterangan tentang bisa membuat rayuan ini dijelaskan dalam seksyen no 133 , 134 dan 149 dalam buku Kanun Acara Jenayah (Syariah) 1994 yaitu :

- 133 : Apabila seseorang yang dituduh telah mengaku salah dan disabitkan (pen. disahkan) oleh hakim atas akuan salahnya , maka tiada rayuan boleh dibuat kecuali tentang takut atau kesalahan hukuman itu .
- 134 : Apabila seseorang yang dituduh telah dibebaskan oleh hakim maka tiada rayuan boleh dibuat kecuali oleh , atau dengan keizinan secara bertulis daripada Ketua Pendakwa Syarie .
- 149 : (1) Peruntukan seksyen 133 dan 134 hendaklah terpakai bagi rayuan daripada Mahkamah Tinggi Syariah pada menjalankan tugas dari bidang kuasa asalnya .
 (2) Tertakluk kepada subseksyen (1) mana-mana orang yang tidak berpuas hati dengan apa-apa penghakiman , hukuman atau perintah yang diumumkan oleh mana-mana Mahkamah Tinggi Syariah dalam sesuatu kes atau perkara jenayah yang kepadanya dia adalah suatu pihak , boleh membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap penghakiman , hukuman atau perintah itu berkenaan dengan apa-apa kesilapan undang-undang atau fakta atau kedua-duanya atau atas alasan apa-apa hukuman yang dikatakan berlebihan atau yang dikatakan tak memadai . (Kanun Acara Jenayah (Syariah) , 1994 : 225 , 232) .

Menurut seksyen di atas , terdakwa bisa membuat rayuan agar diringkankan hukumannya dengan mendapatkan izin secara bertulis daripada

(Ketua Pengadilan Agama atau Wakil Ketua) . Rayuan bisa dilakukan jika siterdakwa tidak puas hati dengan hukuman yang dijatuhkan atasnya dan baginya tidak sesuai dengan dirinya atau perbuatannya atau ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan hukuman itu .

Rayuan keringanan hukuman tersebut bisa dilakukan bagi orang yang baru pertama atau kedua kali melakukan perzinaan dan beliau berjanji untuk bertaubat dan merasa bersalah atas kelakuannya yang sebelum ini . Maka hukumannya bisa menjadi lebih ringan sesuai dengan kemampuan pezina itu sendiri . Rayuan itu tidak bisa diterima bagi mereka yang telah melakukan zina berulang kali seperti pelacur dan mereka yang telah mukhsan , maka hukuman itu dijalankan tanpa adanya keringanan melalui Pengadilan Rayuan . Bagi pelacur mereka bukan saja dikenakan hukuman tersebut di atas , malahan mereka akan dihantar ke Rumah Pemulihan Akhlak (Lembaga Kemasyarakatan) supaya mereka tidak lagi mengulangi perbuatan maksiyat itu . (Wawancara dengan Tuan Mohammad Taifor b. Ahmad Rusdi pada 12 Februari 1998 di Ipoh Perak Malaysia) .

Keterangan bagaimana rayuan itu hendak dibuat dapat diketahui dari seksyen no. 150 yaitu :

150 (1) Tiap-tiap rayuan hendaklah dibuat melalui notis secara bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penghakiman , hukuman

atau perintah itu dijatuhkan atau dibuat dan hendaklah difailkan (pen. dikumpulkan/dibukukan) oleh pihak merayu yang Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah di tempat di mana penghakiman , hukuman atau perintah yang dirayukan itu dijatuhkan atau dibuat dan pada masa yang sama membayar fee (pen. uang jaminan/muka) yang ditetapkan baginya .

- (2) Tiap-tiap notis rayuan hendaklah dibuat dalam borang 9 seperti dinyatakan dalam jadual dan difailkan dalam tujuh salinan yang dialamatkan kepada Mahkamah Rayuan Syariah dan hendaklah mengandungi alamat di mana apa-apa notis atau dokumen berkaitan dengan rayuan itu boleh disampaikan kepada pihak merayu atau kepada peguam syariinya . (Kanun Acara Jenayah Syariah , 1994 : 233) .

Dalam membuat rayuan harus mengikut peraturan yang telah ditetapkan . Rayuan yang dibuat itu hendaklah secara bertulis dan dilakukan dalam tempoh tiga puluh hari dari tanggal yang ditetapkan dalam penghakiman . Semua tuntutan rayuan secara bertulis itu akan dikumpulkan dalam satu map dan diberikan kepada sekretaris Pengadilan Tinggi Syariah . Sekretaris akan meneliti lagi tuntutan rayuan itu dan setelah jelas semuanya barulah beliau dikehendaki membayar uang jaminan pada jumlah tertentu yang telah ditetapkan .

Rayuan itu pula hendaklah dibuat dengan mengisi keterangannya dalam satu formulir yaitu formulir no 9(tentang rayuan) . Semua keterangan ini dibuat dalam tujuh salinan dan semua formulir harus dalam map yang berlainan juga . Kesemua formulir rayuan yang telah ditulis itu dialamatkan

kepada Pengadilan Rayuan Syariah . Antara map dan formulir itu harus juga punya alamat dimana rayuan itu bisa disampaikan kepada pihak merayu yaitu alamat dan keterangan pribadi tentang perayu itu . Formulir rayuan itu juga turut dihantar kepada pengacara syar'inya yaitu pengacara kepada orang yang membuat rayuan itu supaya mudah untuk mengetahui perkembangan rayuan yang telah dibuat itu . Setelah diteliti alasan-alasan yang diberikan , barulah pihak Pengadilan Rayuan bisa menentukan apakah rayuan itu diterima atau tidak .